



**RENCANA KERJA
(*RENJA*)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Alamat: Jl.Jenderal Sudirman No.05 Marabahan
MARABAHAN 70513

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini sudah melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Akhirnya, semoga memberikan manfaat.

Marabahan, Juni 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. EDY ROSADI, MP

NIP. 19670925 199403 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian RENSTRA	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	31
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	47
3.3 Program dan Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan RENJA	70
5.2 Kaidah Kaidah Pelaksanaan	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala periode tahun 2020 yang penyusunannya berdasarkan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Bidang Perikanan sesuai Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Tujuan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 merupakan

rencana kerja program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 - 2022. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peternakan, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan pemerinah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Barito Kuala, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.5. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

1.6. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020.

1.7. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.8. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun-2) perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1).

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dengan Capaian RENSTRA SKPD

2.5. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.6. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Proses penyusunan suatu program dan kegiatan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2018-2022 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kondisi daerah Kabupaten Barito Kuala terkait dengan urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan salah satunya dapat dilihat dari sasaran startegis sebagai berikut :

- **Meningkatnya Kemandirian Pangan**

Pangan merupakan Hak Azasi Manusia, pangan juga menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dan pangan merupakan pilar ketahanan nasional. Ketahanan pangan merupakan pilar pembangunan sektor lainnya. Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu bangsa mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan nasional terganggu.

Meningkatnya kemandirian pangan merupakan merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 2 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian** ”. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menetapkan “Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan” sebagai indikator kinerja utama.

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro). PPH ketersediaan pangan adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang di anjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi (FAO-RAPA,1989). Tujuan penyusunan PPH adalah rasionalisasi pola ketersediaan pangan yang dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan (bagi kualitas hidup penduduk), yang kemudian digunakan sebagai bahan penilaian ketersediaan pangan

penduduk (jumlah, mutu, keseimbangan gizi dan komposisi/anekaragam pangan).

Keberagaman ketesedian pangan dibutuhkan untuk mengarahkan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia di lingkungan dan di pasaran. Kondisi inilah yang mendasari dibutuhkannya hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan. PPH ketersediaan disusun untuk menyeimbangkan antara keberagaman pangan yang tersedia yang kemudian di konsumsi oleh masyarakat. Dalam penyusunannya, Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan selalu menyertai Neraca Bahan Makanan (NBM).

Pada tahun anggaran 2020 melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya meningkatkan kemandirian pangan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Kegiatan tersebut merupakan lanjutan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- c. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
- d. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

e. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

- **Meningkatnya Diversifikasi Pangan**

Meningkatnya Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Konsep diversifikasi hanya terbatas pangan pokok, sehingga diversifikasi konsumsi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras (Pakpahan dan Suhartini, 1989). Pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan (Suhardjo, 1998).

Peningkatan diversifikasi pangan juga bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari sumber gizi yang lebih beragam dan seimbang. Diversifikasi pangan yang dilakukan masyarakat kawasan ASEAN umumnya, dan Indonesia khususnya yaitu berupa nasi, karena mayoritas wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah penghasil beras. Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program tersebut dengan menjelaskan definisi diversifikasi pangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan demi mewujudkan swasembada beras dengan meminimalkan konsumsi beras agar tidak melebihi produksinya.

Meningkatnya diversifikasi pangan merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 2 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian**”. Dalam upaya

pencapaian misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menetapkan “Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi” sebagai indikator kinerja utama. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai:

1. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan.
2. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah.
3. Baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Pada tahun anggaran 2020 melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi kelompok wanita untuk menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Kegiatan tersebut merupakan lanjutan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Adapun kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 adalah :

- a. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
- b. Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tk. Kabupaten dan Propinsi
- c. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
- d. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- **Meningkatnya Produksi Perikanan**

Meningkatnya Produksi Perikanan merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 2 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian**” dengan Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan” yang dituangkan dalam 2 program utama yaitu :

(1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 2 indikator program :

a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang didukung kegiatan :

- Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
- Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan
- Pengembangan Bibit Ikan Unggul
- Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul

b. Persentase kelompok budidaya penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan, didukung kegiatan :

- Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar

(2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan 2 indikator program :

a. Jumlah produksi perikanan tangkap yang didukung oleh kegiatan :

- Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

b. Persentase kelompok penangkapan penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan yang didukung kegiatan :

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Tercapainya sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan juga didukung oleh 2 program pendukung lainnya, yaitu :

(1) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dengan indikator program :

a. Jumlah kasus pelanggaran penangkapan ikan (kasus) yang didukung oleh kegiatan :

- Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

(2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan indikator program :

b. Jumlah hasil olahan perikanan yang didukung oleh kegiatan :

- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
- Pendampingan Pada Kelompok Pengolahan Perikanan

Pada tahun anggaran 2019 melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dilaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dalam meningkatkan produksi perikanan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 adalah :

(1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 2 indikator program :

a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang didukung kegiatan :

- Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
- Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan
- Pengembangan Bibit Ikan Unggul

b. Persentase kelompok budidaya penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan, didukung kegiatan :

- Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar

(2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan 2 indikator program :

a. Jumlah produksi perikanan tangkap yang didukung oleh kegiatan :

- Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

b. Persentase kelompok penangkapan penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan yang didukung kegiatan :

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Tercapainya sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan juga didukung oleh program pendukung lainnya, yaitu :

(3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan indikator program :

b. Jumlah hasil olahan perikanan yang didukung oleh kegiatan :

- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilaksanakan setelah semester I tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun Tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Tahun 2019, pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2018 – 2022	Realisasi Target Kinerja Capaian Program Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja n-1) 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (kolom 7 + 9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0		Non Usuran								
0	0	-								
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							

0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	5100 buah surat	1020 buah surat	1020 buah surat	1020 buah surat	100	1020 buah surat	2040 buah surat	40
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM, telepon	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak STNK dan KIR mobil/kendaraan yang dibayar	385 buah	55 buah	71 buah	55 buah	77,46	71 buah	132 buah	32,72
0	0	1	8	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	116 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100	20 jenis	40 jenis	34,48
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	180 jenis	32 jenis	36 jenis	32 jenis	100	36 jenis	68 jenis	37,78
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah jenis cetakan berkas kantor	25 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	10 jenis	40
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	50 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	20 jenis	40
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Surat Kabar Harian/media cetak	540 eksemplar	108 eksemplar	108 eksemplar	108 eksemplar	100	108 eksemplar	216 eksemplar	40
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu, rapat	69.430 porsi	12.877 porsi	13.886 porsi	12.877 porsi	93,14	13.886 porsi	26.763 porsi	38,55

0	0	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	600 laporan	116 laporan	116 laporan	116 laporan	100	98 laporan	214 laporan	35,67
0	0	1	20	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan	968 laporan	117 laporan	125 laporan	117 laporan	100	140 laporan	257 laporan	26,55
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
0	0	2	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 unit	0	0	0	0	3 unit	3 unit	42,86
0	0	2	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	32 buah	0	0	0	0	6 buah	6 buah	18,75
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
0	0	2	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2 dan speed boat yang siap operasional	385 buah	49 buah	49 buah	49 buah	100	49 buah	98 buah	25,45
0	0	2	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional	457 buah	46 buah	46 buah	46 buah	100	47 buah	93 buah	20,35
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									

0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan meningkat Kompetensinya	52 OK	1 OK	1 OK	1 OK	100	4 OK	5 OK	9,62
0	0	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
0	0	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu	20 dokumen	0	0	0	0	5 dokumen	5 dokumen	25
4													
4	18				Penanaman Modal								
4	18	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
4	18	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi / Promosi Daerah	Jumlah pameran yang mempromosikan hasil pembangunan daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	-	-	100
4	9				Pangan								
4	9	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)									
4	9	15	3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah rumah tangga yang dipantau pola konsumsinya	1350 Rumah tangga	270 Rumah tangga	270 Rumah tangga	270 Rumah tangga	100	270 Rumah tangga	540 Rumah tangga	40

4	9	15	5	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan masyarakat	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
4	9	15	9	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok wanita kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang dibina	25 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100	5 kelompok	10 kelompok	40
4	9	15	11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah pasar yang dipantau terkait harga pangan	10 pasar	6 pasar	6 pasar	6 pasar	100	7 pasar	7 pasar	70
4	9	15	13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten	72 ton	11 ton	11 ton	11 ton	100	11 ton	22 ton	30,56
4	9	15	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah desa mandiri pangan	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	100	23 desa	23 desa	100
4	9	15	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah lumbung pangan masyarakat dengan stock gabah diatas 3 ton	42 lumbung	14 lumbung	8 lumbung	14 lumbung	175	8 lumbung	22 lumbung	52,38
4	9	15	19	Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK)	Pembangunan lumbung pangan masyarakat	-	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
4	9	15	22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah komoditas pangan yang diuji keamanan pangannya	62 komoditas	10 komoditas	10 komoditas	10 komoditas	100	10 komoditas	20 komoditas	40
4	9	15	32	Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Jumlah jenis promosi ketahanan pangan	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	4 jenis	40

2					Pilihan								
2	25				Kelautan dan Perikanan								
2	25	17			Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut								
2	25	17	01	Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Persentase kasus illegal fishing yang ditindaklanjuti sampai proses P21	100 persen	-	100	-	0	0	0	100
2	25	20			Program Pengembangan Budidaya Perikanan								
2	25	20	1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah produksi benih ikan unggul yang tersedia untuk masyarakat	1.725.080 ekor	315.500 ekor	315.500 ekor	315.500 ekor	100	330.940 ekor	646.440 ekor	37,47
2	25	20	2	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah peserta sosialisasi pembudidaya ikan yang memahami Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	300 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100	80 orang	140 orang	46,67
2	25	20	5	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar	Jumlah kelompok perikanan budidaya penerima sarana dan prasaranan sesuai kriteria	25 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	100	4 kelompok	8 kelompok	32
2	25	20	10	Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)	Jumlah produksi benih ikan unggul yang tersedia untuk masyarakat	1.725.080 ekor	315.500 ekor	315.500 ekor	315.500 ekor	100	330.940 ekor	646.440 ekor	37,47

2	25	20	11	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)	Jumlah kelompok perikanan budidaya penerima sarana dan prasarana sesuai kriteria	-	7 kelompok	7 kelompok	7 kelompok	100	13 kelompok	20 kelompok	100
2	25	20	13	Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan	Jumlah jenis pakan yang disediakan	25 jenis	5 jenis	5 Jenis	5 jenis	100	5 jenis	10 jenis	40
2	25	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
2	25	21	1	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan tangkap yang dibina dan berkembang usahanya	900 orang	180 orang	180 orang	180 orang	100	180 orang	360 orang	40
2	25	21	07	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok perikanan penangkapan penerima sarana dan prasarana sesuai kriteria	15 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100	3 kelompok	6 kelompok	40
2	25	21		Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)	Jumlah kelompok perikanan penangkapan penerima sarana dan prasarana sesuai kriteria	-	-	-	-	-	1 kelompok	1 kelompok	100
2	25	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan									
2	25	23		Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah peserta pelatihan yang mampu melakukan diversifikasi olahan	300 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100	60 orang	120 orang	40

Dari tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja periode Tahun 2018 realisasi program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara fisik adalah 99,92% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.632.907.768,- atau 97,10% dari pagu sebesar Rp. 6.832.554.642,-

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan :

1. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.

Sampai periode Desember 2018 realisasi fisik program adalah 0%. Hal ini disebabkan pada Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dengan indikator program “Jumlah kasus pelanggaran penangkapan ikan yang ditindaklanjuti “ dengan target 3 kasus pelanggaran, sampai akhir Desember 2018 tidak terdapat kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti oleh dinas. Melalui program ini dilaksanakan kegiatan berupa pemberkasan kasus kasus illegal fishing bekerjasama dengan PPNS dan aparat kepolisian. Apabila dilihat dari capaian indikator program dengan realisasi 0 maka capaian kinerja masuk kategori tidak bagus, tetapi sebenarnya semakin kecil jumlah kasus illegal fishing artinya semakin besar kesadaran masyarakat terhadap kelangsungan sumberdaya perairan. Semakin besar kesadaran masyarakat melakukan penangkapan ikan secara ramah lingkungan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah produksi tangkapan. Dukungan program ini terhadap sasaran yang akan dicapai oleh dinas yaitu

“Meningkatnya produksi perikanan” sangat diperlukan, karena dengan adanya program ini akan membatasi masyarakat dalam melakukan penangkapan ikan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

Sampai periode Desember 2018 realisasi fisik program mencapai 108,33%.

Program ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- Analisis Data Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Pada kegiatan ini dilakukan analisis data konsumsi yang dengan 270 sampel rumah tangga yang dipantau pola konsumsinya sesuai target yang telah ditetapkan dinas. Dari analisis menghasilkan Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan yang memuat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi ini digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Sampai periode bulan Desember 2018 telah dilaksanakan analisis data konsumsi pangan yang menghasilkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 83,4. Hal ini menunjukkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan di Kabupaten Barito Kuala cukup ideal. Karena Pola konsumsi pangan ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Jika dilihat dari target Skor PPH konsumsi tahun 2018 yang ingin dicapai sebesar 84,1 realisasi Skor PPH Konsumsi yang dicapai sebesar 99,17 %.

Dari hasil analisis diperoleh skor PPH Konsumsi sebesar 83,4 untuk kelompok pangan. Dari perolehan skor PPH Konsumsi tersebut, yang telah melebihi skor maksimum adalah kelompok padi-padian. Jika dilihat dari pola konsumsi pangannya, kelompok padi-padian masih didominasi oleh beras. Sedangkan kelompok pangan lain masih rendah terutama kelompok kacang-kacangan, sayur dan buah, umbi-umbian, buah/biji berminyak dan gula.

- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Pada kegiatan ini dilakukan penghitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Hasil dari penghitungan tersebut berupa 1 buah dokumen analisis ketersediaan pangan masyarakat atau realisasi fisik kegiatan 100% sesuai target dinas dan memuat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang merupakan satu alat ukur untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro).

Hasil analisis Ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan NBM tahun 2018, bahwa ketersediaan energi 5.002 kkal/kap/hari dengan ketersediaan protein 118,3 gr/kap/hari, sedangkan standar (rekomenisasi Widiyakarya Nasional Pangan dan gizi (WNPG) X tahun 2012 angka kecukupan energi 2.400 kkal/kap/hr dan kecukupan protein 63 gr/kap/hr. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan energi dan protein tahun 2018 dikabupaten Barito Kuala telah melebihi target standar kecukupan energi dan protein.

- Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Pada kegiatan ini dilaksanakan Lomba Cipta Menu Pangan (B2SA) dan Lomba Masak Ikan dari tingkat kabupaten yang diikuti oleh 17 kecamatan se-kabupaten Barito Kuala, tingkat provinsi dan nasional. Disamping itu juga dilakukan promosi dan informasi tentang pangan dan hasil olahan pangan melalui partisipasi pameran di tingkat provinsi dan nasional. Sampai periode Desember 2018 realisasi kegiatan adalah 100%.

- Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan

Pada kegiatan ini dilakukan uji terhadap 10 jenis sampel sayuran yang dijual di kabupaten Barito Kuala. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Uji Keamanan Pangan di Bogor. Hasil uji akan dijadikan acuan keamanan pangan kabupaten Barito Kuala. Sampai periode Desember 2018 realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

- Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Pada kegiatan ini target akhir renstra akan dilaksanakan pendampingan terhadap 42 kelompok Lumbung Pangan Masyarakat di kabupaten Barito Kuala melalui pertemuan antara pengurus lumbung pangan dengan dinas dan stekholder lainnya. Pertemuan ini juga merupakan ajang koordinasi antara pengurus lumbung dengan dinas dan stekholder lainnya untuk mengetahui kondisi stok pangan di masyarakat dan permasalahan yang ada di masyarakat. Pada tahun 2018 ditargetkan pendampingan

terhadap 8 kelompok lumbung pangan dengan realisasi pendampingan kelompok sebanyak 14 kelompok atau 175%.

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Pada kegiatan ini dilaksanakan koordinasi antara masyarakat dari 23 desa kawasan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan dinas terkait dan stakholder lainnya. Melalui koordinasi ini diharapkan masyarakat desa mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari. Sampai Desember 2018 realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Pada kegiatan ini dilaksanakan Pengadaan Beras untuk cadangan pangan daerah sebanyak 11 ton sesuai target yang ditentukan. Kondisi cadangan pangan daerah pada tahun 2017 sejumlah 84,5 ton gabah. Dengan penambahan pengadaan tersebut, jumlah cadangan pangan daerah di kabupaten Barito Kuala tahun 2018 adalah 84,5 ton gabah dan 11 ton beras. Selanjutnya cadangan pangan berupa gabah akan diganti dengan beras, hal ini berkaitan dengan adanya kerjasama antara dinas dengan BULOG. Sampai periode bulan Desember 2018 realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Pada kegiatan ini dilaksanakan pemantauan harga pangan pokok pada 6 pasar sampel. Dari hasil pemantauan tersebut kemudian

dilakukan pengolahan data sehingga data harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan. Sampai periode Desember 2018 realisasi kegiatan adalah 100%, hal ini disebabkan jumlah pasar yang dipantau terkait harga pangan sejumlah 6 pasar sesuai dengan target yang ditetapkan dinas.

- Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Untuk merangsang pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu penyedia pangan keluarga, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pada kegiatan ini dilakukan pembinaan dan penyediaan bibit tanaman kepada 5 Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan harapan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan KRPL sebagai bentuk dukungan terhadap Hari Pangan Sedunia (HPS) di Kec. Jejangkit. Sampai periode bulan Desember 2018, realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Sampai periode November 2018 realisasi fisik program mencapai 100%. Program ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan bibit ikan unggul

Pada kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul dilaksanakan pembenihan ikan dengan tujuan menyediakan bibit ikan unggul bagi masyarakat pembudidaya di Kabupaten Barito Kuala. Target

benih yang dihasilkan sebanyak 315.500 ekor benih dan target PAD sebesar Rp. 41.000.000,-. Sampai Desember 2018, benih yang dihasilkan dan terjual sebanyak 315.500 ekor atau 100% dengan capaian PAD sebesar Rp. 41.000.000,-. Kegiatan ini juga didukung oleh pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 788.000.000,- yang digunakan untuk rehabilitasi kolam di BBI. Kegiatan yang bersumber dari dana DAK tersebut realisasi fisik 100%.

- Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Pada kegiatan ini dilakukan pendampingan pada kelompok budidaya ikan dan juga para pelaku usaha budidaya melalui pelatihan dan temu usaha para pelaku usaha budidaya. Tujuan dilaksanakannya pendampingan kelompok adalah agar para pelaku usaha budidaya mengetahui cara budidaya ikan yang baik dan benar, mengetahui analisis usaha budidaya ikan seperti harga pokok produksi, harga jual dan keuntungan yang diperoleh serta mengetahui struktur organisasi. Sehingga diharapkan anggota POKDAKAN dapat menerapkan apa yang telah disampaikan sehingga nantinya dapat meningkatkan penghasilan dan keuntungan dari hasil perikanan. Sampai Desember 2018 telah dilaksanakan pendampingan melalui pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dengan target 60 orang pembudidaya dan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

- Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar

Kegiatan ini menyediakan dan menyalurkan bantuan sarana dan prasarana budidaya kepada kelompok budidaya ikan. Pada tahun

2018 telah disalurkan bantuan sarana dan prasarana budidaya berupa mesin pompa pada Pokdakan Sumber Rejeki dan Pokdakan Harapan Kita di Desa Jejangkit Muara Kec. Jejangkit (masing masing 1 buah), 1 buah mesin pompa pada Pokdakan Haruan Jelapat di Kecamatan Tamban, bantuan benih patin sebanyak 40.000 ekor dan pakan pada Pokdakan Nusa Tinggiran Kec. Mekarsari. Kegiatan ini juga didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa bantuan benih ikan patin sebanyak 28.000 ekor dan pakannya kepada 7 pokdakan, yaitu Pokdakan Karya Bersatu dan Pokdakan Bina Bersama Tinggiran di kec. Mekarsari, Pokdakan Berkat Bersama dan Pokdakan Semangat Sukses di Kec. Tamban, Pokdakan Setia Kawan di Kec. Alalak, Pokdakan Sari Mulya dan Pokdakan Maju Bersama Sei. Teras di Kec. Tabunganen. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat para pelaku usaha budidaya sehingga dapat meningkatkan produksi budidaya.

Sampai periode Desember 2018 realisasi fisik kegiatan 100%

- Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan

Kegiatan ini menyediakan pakan untuk pemeliharaan ikan di UPTD Balai Benih Ikan Sei. Kambat Kec. Cerbon. Pelaksanaan pengadaan pakan melalui proses pengadaan langsung. Target pakan yang disediakan sebanyak 5 jenis pakan yaitu pakan Induk, pakan benih 1, pakan benih 2, pakan benih 3 dan artemia, realisasi fisik kegiatan periode Desember 2018 adalah 100%

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Sampai periode November 2018 realisasi fisik program sebesar 100%.

Program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu :

- Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Pada kegiatan ini dilakukan pendampingan terhadap nelayan sebanyak 180 orang. Tujuan pendampingan ini adalah agar para nelayan memahami aturan dalam melakukan penangkapan ikan, karena dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan kita harus menjaga kelestarian ikan. Sampai periode Desember 2018 realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Kegiatan ini menyediakan dan menyalurkan bantuan sarana dan prasarana penangkapan pada kelompok perikanan tangkap. Pada tahun 2018 telah disalurkan jaring insang kantong sebanyak 141 unit kepada 3 kelompok penangkapan, yaitu kelompok Baung Raya dan kelompok Sinar Nila di Kec. Barambai serta kelompok Jelawat di Kec. Marabahan. Tujuan penyaluran bantuan ini adalah, agar kelompok perikanan tangkap semakin bersemangat dan tetap menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga selain bermanfaat untuk peningkatan produksi penangkapan, juga tetap menjaga kelestarian sumberdaya perairan.

Sampai periode Desember 2018 realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Sampai periode Desember 2018 realisasi fisik program sebesar 100%. Program ini didukung oleh kegiatan :

- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pada kegiatan ini dilaksanakan demo pengolahan ikan terhadap 60 orang istri nelayan yang merupakan suatu usaha untuk mendiversifikasikan olahan hasil perikanan tangkap, sehingga memicu peningkatan produksi olahan hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan .

Sampai Desember 2018 realisasi fisik kegiatan 100%.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan dapat dilihat dengan adanya sinergi antara pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi dan pembangunan daerah kabupaten/kota, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala selaku Dinas Teknis mencoba untuk mensinergikan pembangunan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung pembangunan yang sinergis antara pusat, provinsi dan daerah.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keberlangsungan ketersediaan pangan pemerintah dan masyarakat dan peningkatan produksi seluruh komoditi perikanan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk kurun waktu RPJMD 2017- 2022 pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (score)	Ketersediaan dan Cadangan Pangan		86	87	88	89	86	87	88	89	Hasil analisis Ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2018, bahwa ketersediaan energi 5.002 kkal/kap/hari dengan ketersediaan protein 118,3 gr/kap/hari, sedangkan standar (rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan gizi (WNPG) X tahun 2012 angka kecukupan energi 2.400 kkal/kap/hr dan kecukupan protein 63 gr/kap/hr. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan energi dan protein tahun 2018 dikabupaten Barito Kuala telah melebihi target standar kecukupan energi dan protein. Capaian indikator sasaran “Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan” kabupaten adalah skor 86, Hal ini menggambarkan bahwa kondisi keragaman gizi dan ketersediaan pangan di kabupaten cukup beragam walaupun belum ideal (skor 100)
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Penganekaragaman dan Keamanan		84,1	84,9	85,8	86,7	83,4	84,9	85,8	86,7	Pola konsumsi pangan ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Semakin tinggi skor PPH Konsumsi, semakin

	(score)	Pangan										<p>beragam dan seimbang gizi pangan yang dikonsumsi.</p> <p>Berdasarkan hasil analisis Skor PPH konsumsi Kabupaten Barito Kuala mencapai skor 83,4. Hal ini menunjukkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan di Kabupaten Barito Kuala masih belum ideal. Ini dapat dilihat dari skor PPH masih dibawah skor 100. Jika dilihat dari target Skor PPH konsumsi tahun 2018 yang ingin dicapai sebesar 84,1 realisasi Skor PPH Konsumsi yang dicapai sebesar 99,17 %. Dari perolehan skor PPH Konsumsi tersebut, yang telah melebihi skor maksimum adalah kelompok padi-padian karena menjadi makanan pokok di Indonesia.</p>
3	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	-		19.612	19.716	19.822	19.929	19.921	19.716	19.822	19.929	<p>Penghitungan Jumlah Produksi Perikanan pada tahun 2018 diperoleh melalui penghitungan statistik, dimana pengumpulan data dilakukan oleh Penyuluh Perikanan sebagai enumerator, dan penghitungan data statistik dilakukan oleh pihak dinas. Hasil dari penghitungan divalidasi oleh validator statistik dinas dengan membandingkan data yang ada pada bidang. Dari hasil penghitungan statistik diperoleh angka produksi perikanan sebanyak 19.921 ton yang terdiri dari jumlah produksi budidaya sebanyak 10.050 ton atau 97,92% dari target 10.264 ton dan produksi penangkapan sebanyak 9.871 ton atau 105,59% dari target 9.348 ton. Dari hasil penghitungan statistik, produksi budidaya tidak mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan adanya mortalitas yang cukup tinggi di karamba jaring apung pada bulan maret dan april 2018 akibat perubahan cuaca yang menyebabkan perubahan kualitas air.</p>

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perkembangan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama periode 2012 - 2017 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017

ESS. II	SATUAN	2013		2014		2015		2016		2017	
		TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	
Persentase Cadangan Pangan	%	100	100	100	100	100	102,22	100	96,32	100	89,57
Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan	%	100	818,2	100	480	100	470	100	170	100	110
Persentase Produksi Perikanan	%	100	100,12	100,00	106,970	100,00	98,28	100,00	95,04	100,00	112,600
ESS. III	SATUAN	2013		2014		2015		2016		2017	
		TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	25	25	46	46	60	64	75	70,5	100	84,5
Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	Ton	93	93	108	108	120	120	129	126	135	126
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Score	77	83,3	78	81,8	79	82,7	80	80,7	83	83,3
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8892,65	8902,1	9070,5	10.279,80	9251,91	8518,8	9436,95	7900,5	7979,5	10.161,74
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9335	9347,7	9338	9412,2	9340	9753,9	9343	9948,85	9346	9346

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Barito Kuala masih rendah karena pola makan masyarakat masih belum beragam, bergizi seimbang dan masih didominasi bahan makan berupa beras.
- b) Penanganan distribusi pangan melalui program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitas harga belum optimal dan memadai, karena penempatan PLDPM belum merata.
- c) Pengawasan keamanan pangan belum optimal, terutama untuk komoditi pangan segar berupa sayuran dan buah buahan.
- d) Pencapaian penanganan kerawanan pangan masih belum optimal akibat kurangnya sumberdaya manusia.
- e) Penguatan kelembagaan lumbung pangan dan perluasan desa mandiri pangan masih belum maksimal.
- f) Kualitas SDM masih rendah, sehingga teknologi usaha perikanan belum bisa dikuasai sepenuhnya.
- g) Lemahnya permodalan merupakan masalah klasik belum bisa terpecahkan secara tuntas. Disisi lain lembaga perkreditan/perbankan kurang berminat menyalurkan kredit, karena usaha perikanan dinilai berisiko tinggi.
- h) Tumpang tindih pemanfaatan lahan yang terus terjadi, sebagai akibat dari belum optimalnya penyusunan tata ruang dan pengendaliannya.
- i) Degradasi sumberdaya perikanan karena eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan maupun dampak dari kegiatan lain, misalnya adanya perkebunan sawit, stockpile batu bara.
- j) Perubahan musim akibat dari global warming effect (pemanasan global) sangat merugikan pembudidaya dan nelayan karena menyebabkan perubahan kualitas air yang cukup signifikan.

k) Mulai dilaksanakannya AFTA sebagai wujud diawalinya liberalisasi investasi dan perdagangan global (APEC 2010 dan WTO 2020).

Sebagai indikasi, saat ini makin meningkatnya akses produk-produk asing terhadap pasar dalam negeri sebagai konsekuensi pelaksanaan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan persaingan produk-produk perikanan yang semakin ketat.

Visi yang tertuang di dalam RPJMD ini merupakan visi misi jangka menengah Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah :

**“ TERWUUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA
MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA “**

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator

kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran ketahanan pangan dan perikanan dominan pada misi kedua dengan target ketersediaan pangan daerah dan peningkatan produksi perikanan.

Sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Barito Kuala berperan sebagai sumber pangan, lapangan kerja, perdagangan dan industri, rekreasi serta kesejahteraan ekonomi yang sangat penting bagi seluruh masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya untuk mensejahterakan masyarakat melalui tahapan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu.

Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

1. Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan Ketahanan Pangan secara umum menyangkut pertumbuhan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana

usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

2. Arus globalisasi telah menghadapkan sistem pangan nasional pada persaingan pasar yang semakin ketat dan menekan kemampuan produksi pangan nasional. Untuk itu diperlukan kemampuan teknis dan manajemen untuk mengangkat daya saing produk pangan nasional, yang sebagian besar dihasilkan oleh para petani kecil.
3. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah rendahnya pendapatan masyarakat miskin yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan; serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha mikro. Hal ini perlu pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yaitu membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengatasi masalah pangan yang terjadi baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat di sekitarnya.
4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelaku usaha perikanan baik di bidang penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan

Potensi dan peluang dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perikanan secara umum adalah :

1. Besarnya penduduk sebagai pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional;
2. Perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang untuk efektivitas manajemen pembangunan ketahanan pangan dan perikanan, juga menunjang pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
3. Masih tersedia sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan serta teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan;
4. Pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil;
5. Kemajuan teknologi komunikasi, dan informasi, serta organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat
6. Meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan (ekspor) seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran akan pentingnya keamanan gizi dan pangan.

7. Masyarakat Kalimantan Selatan terkenal dengan “Gemar Makan Ikan” sehingga mengharuskan penyediaan stok ikan yang cukup.
8. Adanya kebijakan pusat yang lebih meningkatkan anggaran pembangunan secara langsung ke kabupaten/kota melalui dana dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP) dan DAK

Tersedianya tata ruang lingkungan pemukiman nelayan dan perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Barito Kuala yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dirumuskan sbb :

- Belum optimalnya stok cadangan pangan dan distribusi pangan serta minimnya ketersediaan produk pangan
- Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya sektor perikanan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan Dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementrian Kelautan dan Perikanan menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

3.1.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian

Tabel 4. Hasil Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian

No	Isu Strategis K/L	Program Prioritas K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim.	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.	Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global	Revitalisasi lingkungan dan penerapan teknologi ramah lingkungan
2.	Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana,	Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat.	Kurangnya ketersediaan infrastruktur,	Revitalisasi infrastruktur pertanian

No	Isu Strategis K/L	Program Prioritas K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	lahan dan air		sarana prasarana, lahan, dan air	
3.	Kecilnya status dan luas penggunaan lahan serta tekanan degradasi dan alih fungsi lahan	Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor.	Status dan luas lahan kepemilikan lahan petani sangat terbatas	Tata ruang lahan pertanian
4.	Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi.	Peningkatan kesejahteraan petani (Ketersediaan pangan)	Kondisi iklim yang tidak menentu mempengaruhi proses produksi, ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan	Tersedianya potensi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ketersediaan pangan
5.	Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik.	Peningkatan Konsumsi pangan lokal	Masih kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Berkembangnya industri dan teknologi pengolahan pangan serta potensi masyarakat yang telah mampu memproduksi, mengolah dan mengkonsumsi pangan lokal
6.	Rendahnya Nilai	Peningkatan kesejahteraan petani	Terjadinya gagal panen akibat	Adanya standarisasi

No	Isu Strategis K/L	Program Prioritas K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Tukar Petani (NTP)	(Distribusi pangan/stabilitasi harga)	dari gangguan musim, bencana alam, serangan hama penyakit dan lainnya yang dapat mengakibatkan menurunnya produksi pangan	harga pangan strategis bagi para pelaku distribusi pangan dan adanya kerja sama antar lembaga pemasaran dalam rangka pengendalian harga pangan

3.1.2 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

VISI KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”

MISI untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah :

1. Kedaulatan (Sovereignty),

yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 36 dengan mengamankan sumberdaya kelautan

dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan

2. Keberlanjutan (sustainability),

yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity),

yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (Sovereignty), yakni

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (sustainability), yakni

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (Prosperity), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Arah Kebijakan dan strategi KKP disusun dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi :
 - Memberantas IUU Fishing
 - Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi
 - Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan
- b. Membangun prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi :
 - Mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut dan pesisir
 - Mengelola sumberdaya ikan di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI)
 - Mengendalikan sumberdaya perikanan tangkap
 - Mengelola pemanfaatan perairan umum daratan (PUD)
 - Membangun kemandirian dalam budidaya perikanan
 - Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan

- Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan
 - Merehabilitasi ekosistem dan perlindungan lingkungan laut
 - Membangun kemandirian pulau-pulau kecil
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :
- Memberi perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam
 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
 - Meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan
 - Meningkatkan kompetensi masyarakat KP melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
 - Mengembangkan inovasi IPTEK bidang kelautan dan perikanan

2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. Pengarusutamaan gender dibidang kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP
- b. Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi mempercepat pengeurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah

- c. Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi
 - Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Peningkatan ketahanan masyarakat KP terhadap perubahan iklim
- d. Tata kelola pemerintahan yang baik, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah
 - Membangun budaya kerja yang profesional
 - Meningkatkan kualitas pengawasan internal

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Pangan dan Perikanan memiliki dan berperan dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu : ***Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera*** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan peluang yang tersedia, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Tujuan Pembangunan Sektor Pangan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah :

1. Meningkatkan stok cadangan pangan dan kemampuan membangun sistem distribusi pangan serta meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup
2. Meningkatkan diversifikasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk pemenuhan pangan masyarakat
3. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan

3.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kemandirian pangan

dengan indikator sasaran strategis : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

2. Meningkatnya diversifikasi pangan

dengan indikator sasaran strategis : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

3. Meningkatnya Produksi Perikanan

dengan indikator sasaran strategis : Jumlah Produksi Perikanan

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2017-2022

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan stok cadangan pangan dan kemampuan membangun sistem distribusi pangan serta meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup		Persentase peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan (%)	1,18	1,16	1,15	1,14	1,12
		Meningkatnya kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86	87	88	89	90
2.	Meningkatkan diversifikasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk pemenuhan pangan masyarakat		Persentase peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	1	1	1	1	1
		Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,1	84,9	85,8	86,7	87,5
3.	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan		Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	19.612	19.716	19.822	19.929	20.036

3.3. Program dan Kegiatan

Mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 -2022 dan berdasarkan Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala periode tahun 2017 – 2022 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan.

Program merupakan instrumen kebijakan yang meliputi serangkaian kegiatan untuk merealisasikan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi program.

Pada dasarnya semua program yang diimplementasikan dicirikan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Berbasis masyarakat
- b) Berwawasan lingkungan
- c) Berorientasi pasar
- d) Berkesesuaian dengan lingkungan spesifik domestik
- e) Bersinergi antara program sektoral dan regional
- f) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Ada 5 (lima) program yang akan dilaksanakan dalam rencana strategis Pembangunan Urusan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kabupaten Barito Kuala melalui :

1. Ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan dan berkesinambungan
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan
3. Lancarnya distribusi, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga pangan.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan untuk tercapainya indicator kinerja yang ditargetkan, yaitu :

- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
- Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
- Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja Program (Outcome)
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

No	INDIKATOR	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Lumbung Pangan Yang Mandiri	Persen	10	20	30	40	50
2	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ton	34,246	42,246	53,246	64,246	75,246
3	Koefisiensi Variasi Harga Beras di Tingkat Konsumen	Persen	10	9,8	9,6	9,4	9,2
4	Penurunan Konsumsi Beras	Persen	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
5	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi	Persen	80	80,5	81	81,5	82

Sumber : Kepala Bidang Ketahanan Pangan

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini menangani semua kegiatan yang berkaitan dengan budidaya perikanan baik dari pembesaran, pembenihan dan sarana dan prasarana penunjang budidaya dan pembenihan, yang mengarah pada Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB). Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk mencapai peningkatan produksi perikanan melalui usaha budidaya yang dilaksanakan masyarakat kabupaten

Barito Kuala. Program ini dalam pencapaian indicator kinerjanya didukung dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- Pengembangan Bibit Ikan Unggul
- Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan
- Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul
- Revitalisasi Perikanan Budidaya Di Kawasan Budidaya Air Tawar
- Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Melalui program ini, diharapkan budidaya perikanan di Kabupaten Barito Kuala akan berkembang sesuai dengan potensi yang telah dimiliki. Pembudidaya skala kecil dan menengah merupakan target utama. Peningkatan produktivitas yang selanjutnya meningkatkan produksi dan pendapatan adalah hal pokok yang ingin dicapai.

Indikator Kinerja (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja Program (Outcome) Pengembangan Budidaya Perikanan

No	INDIKATOR	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10.264	10.366	10.470	10.575	10.680
2	Persentase Kelompok Budidaya Penerima Sarpras Yang Memanfaatkan Sesuai Dengan Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Dalam rangka mewujudkan usaha budidaya dengan menerapkan sistem usaha berdaya saing dan berkelanjutan serta berbasis pedesaan,

maka Balai Benih Ikan Lokal Sungai Kambat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berperan sebagai motor penggerak dalam melaksanakan program budidaya ikan khususnya budidaya ikan air tawar.

Tujuan dan tugas pokok dari Balai Benih Ikan Lokal Sungai Kambat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dan menyalurkan benih ikan yang bermutu.
2. Menerapkan dan menyebarluaskan teknologi perbenihan kepada UPR dan pembudidaya.

Indikator hasil (outcome) yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Indikator Hasil (Outcome) Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

No	INDIKATOR	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Produksi Benih Ikan Unggul Yang Tersedia Untuk Masyarakat	Ekor	315.500	330.940	346.600	366.500	365.540
2	Jumlah Kelompok UPR Yang Dibina Sehingga Meningkatkan Produksi Benihnya	Kelompok	3	3	3	3	3
3	Jumlah Petugas Teknis Perbenihan Yang Meningkatkan Kemampuannya	Orang	6	6	6	6	6

Sumber : Kepala UPTD Balai Benih Ikan Sei. Kambat

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dititikberatkan pada upaya penangkapan yang terkendali di perairan umum dan sebagian perairan laut, karena kewenangan kelautan di kabupaten dibatasi oleh UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peningkatan produktifitas dan produksi merupakan indikator kinerja yang ingin dicapai melalui upaya modernisasi teknik penangkapan, menambah sarana penangkapan, penerapan IPTEK, penggunaan alat bantu, peningkatan kemampuan usaha dan lain-lain.

Indikator Kinerja (Outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja Program (outcome) Pengembangan Perikanan Tangkap

No	INDIKATOR	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9.348	9.350	9.352	9.354	9.356
2.	Persentase Kelompok Penangkapan Penerima Sarpras Yang Memanfaatkan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

4. Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program ini merupakan program pendukung dalam pencapaian produksi perikanan tangkap. Dalam program ini memfasilitasi penanganan kasus illegal fishing yang merupakan instrumen kebijakan dalam pelestarian Bidang Perikanan bekerjasama dengan PPNS dan pihak kepolisian. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah :

1. Memberikan dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan lainnya;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati perairan;
3. Meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan melalui penggunaan bahan dan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
4. Mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan;
5. Menjaga sumberdaya perikanan dan keanekaragaman hayati perairan dari kepunahan sebagai akibat dari kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak bertanggungjawab.
6. Menjaga kelestarian sumberdaya perairan khususnya dibidang perikanan.

Melalui program ini diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, serta penegakan hukum menurut Perundang-undangan di Bidang Perikanan.

Tabel 10. Indikator Kinerja Program (outcome)
Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut

No	INDIKATOR	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kasus pelanggaran penangkapan ikan yang ditindaklanjuti	Kasus	3	3	3	3	3

Sumber : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Komoditas produk perikanan pada saat ini sedang mengalami perluasan dan pengembangan di pasar domestik dengan memanfaatkan jaringan modern yang diharapkan dapat mendorong pemasaran produk-produk perikanan hingga ke pemasaran dunia.

Dalam system agribisnis perikanan, dimana meliputi kegiatan mulai pengadaan sarana produksi, produksi, pengolahan pasca panen (agroindustry), pemasaran dan kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Khusus kegiatan pemasaran, disaat produk sudah dihasilkan baik dalam kegiatan sarana produksi, produksi dan agroindustry, maka kegiatan pemasaran sangatlah penting.

Merujuk pada norma atau kaidah pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan adalah proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis,

perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumberdaya, formulasi dan implementasi disertai dengan pengamanan seperlunya terhadap peraturan yang berlaku demi menjaga kelangsungan produksi.

Untuk membina dan mengkoordinir pengembangan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk mencapai peningkatan produksi olahan melalui usaha pengolahan yang dilaksanakan masyarakat kabupaten Barito Kuala. Program ini dalam pencapaian indicator kinerjanya didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
- Pendampingan pada kelompok pengolahan perikanan

Tabel 11. Indikator Kinerja Program (outcome)
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

No	INDIKATOR	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah hasil olahan perikanan	Ton	8,21	8,62	9,05	9,51	9,98

Sumber : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Tabel 12.

Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
		- Pengembangan Lumbung Pangan Desa
		- Pengembangan Desa Mandiri Pangan
		- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
		- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
		- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
		- Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
		- Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
		- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2	Pengembangan Budidaya Perikanan	- Pengembangan Bibit Ikan Unggul
		- Revitalisasi Perikanan Budidaya Di Kawasan Budidaya Air Tawar
		- Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
		- Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan
		- Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul
3	Pengembangan Perikanan Tangkap	- Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
		- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
4	Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	- Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

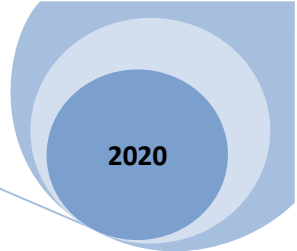
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

5	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
		- Pendampingan pada kelompok pengolahan perikanan

BAB IV***RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH***

Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan bersumber dari APBD (APBD I dan APBD II) dan APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus). Dana APBN dekonsentrasi dikelola oleh SKPD Propinsi, Tugas Pembantuan dikelola oleh SKPD provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus dikelola oleh SKPD kabupaten/kota.

Adapun rencana kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel. 13

**RUMUSAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
0	Non Urusan										
0	0			-							
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0	0	1	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	KabupatenJumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	1.020 buah surat	48.050.000	-	Pembelian materai dan honor 4 orang petugas administrasi umpeg dan pka	1.020 buah surat	37.350.000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

2020

0	0	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah langganan listrik, PDAM, telepon	12 Bulan	80.500.000	-	Pembayaran air, listrik dan telepon kantor dan UPI	12 Bulan	100.000.000
0	0	1	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Pajak STNK dan KIR mobil/kendaraan yang dibayar	77 BUah	23.000.000	-	Pembayaran pajak STNK/BPKB/plat kendaraan (roda 2, 3 dan 4)	77 BUah	23.800.000
0	0	1	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	20 Jenis	31.000.000	-	Penyediaan alat kebersihan, upah tenaga kebersihan kantor dan upah tukang tebas lingkungan kantor	20 Jenis	18.127.500
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	36 Jenis	40.000.000	-	Penyediaan ATK dinas	36 Jenis	49.967.775
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah jenis cetakan berkas kantor	5 Jenis	22.000.000	-	Cetak kwitansi, kop amplop dinas kecil/sedang/besar, pengendali surat keluar/masuk, kop map dinas dan fotocopy	5 Jenis	23.551.000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

2020

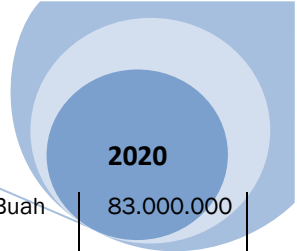
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	10 Jenis	10.000.000	-	Pembelian peralatan listrik	10 Jenis	5.500.000
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	SKPD	Jumlah Penyediaan Surat Kabar Harian/media cetak	108 Exemplar	8.150.000	-	Penyediaan koran nasional dan lokal (8 eksemplar)	108 Exemplar	8.280.000
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu, rapat	13.886 Porsi	58.500.000	-	Makan minum pegawai, rapat dan tamu	13.886 Porsi	71.192.000
0	0	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120 Laporan	250.000.000	-		120 Laporan	325.000.000
0	0	1	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	SKPD	Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan	194 Laporan	68.500.000	-	Musrenbang, inventarisasi aset, monitoring kegiatan	194 Laporan	75.300.000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

2020

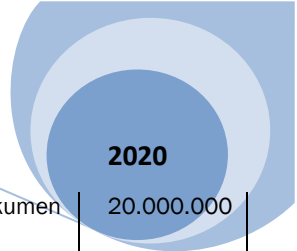
0	0	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah luasan gedung kantor yang dibangun	2 Paket (m2)	200.000.000	-	Pembuatan taman dan rehab ruang kepala dinas	1 Paket (m2)	150.000.000
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	20.000.000	-	Pengadaan seragam hari jadi kabupaten, karangan bunga dan spanduk untuk hari besar	2 Jenis	30.000.000
0	0	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah pembelian peralatan Gedung Kantor	1 BUAH	2.000.000	-	Kipas Angin	5 BUAH	32.000.000
0	0	2	10	Pengadaan Mebeleur	SKPD	Jumlah pembelian mebeleur kantor	10 Buah/set	20.000.000	-	Rak bendahara	2 Buah/set	6.000.000
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik	1 unit/set/m2	27.500.000	-	Upah jaga malam	1 unit/set/m2	21.900.000
0	0	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2 dan speed boat yang siap operasional	50 Buah	120.000.000	-	BBM, service, penggantian suku cadang	77 Buah	292.860.000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



0	0	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional	46 Buah	45.000.000	-		75 Buah	83.000.000
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin Berkala Taman, Tempat Parkir, dan Halaman Kantor	SKPD	Jumlah luasan taman dilingkungan kantor yang dipelihara dan kondisi representatif	1 Paket	100.000.000	-	Rehab tempat parkir	0 Paket	100.000.000
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan meningkat Kompetensinya	6 Orang	93.000.000	-	Bimtek perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian	10 Orang	159.720.000
0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

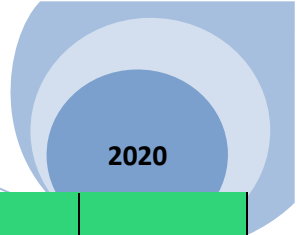


0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu	5 Dokumen	48.400.000	-	RENSTRA, Renja, PK, IKU, LKIP	5 Dokumen	20.000.000
0	0	6	4	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang benar dan tepat waktu	2 Laporan	7.779.200	-	Laporan Aset dan Laporan Keuangan	2 Laporan	20.000.000
4												
4	9			Pangan								
4	9	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)								
4	9	15	03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Kabupaten	Jumlah rumah tangga yang dipantau pola konsumsinya	270 Rumah Tangga	33.153.000	-		270 Rumah Tangga	56.807.000
4	9	15	05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Kabupaten	Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan masyarakat	1 Dokumen	52.271.500	-		1 Dokumen	65.152.000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

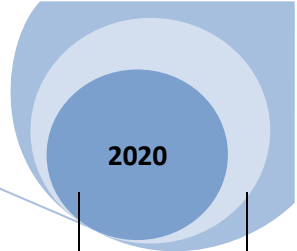
2020

4	9	15	09	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Kabupaten	Jumlah kelompok wanita kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang dibina	5 Kelompok	267.086.000	-	KRPL dan OPAL	5 Kelompok	102.172.000
4	9	15	13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Kabupaten	Jumlah pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten	16 ton	160.550.000	-		16 ton	220.174.000
4	9	15	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Kabupaten	Jumlah lumbung pangan masyarakat dengan stock gabah diatas 3 ton	8 Lumbung	83.480.000	-		8 Lumbung	19.965.000
4	9	15	22	Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	Kabupaten	Jumlah komoditas pangan yang diuji keamanan pangannya	12 Komoditas	24.204.000	-		14 Komoditas	37.334.000
4	9	15	32	Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tk. Kabupaten dan Provinsi	Kabupaten	Jumlah jenis promosi ketahanan pangan	2 Jenis	119.281.600	-	Pameran dan Lomba	2 Jenis	111.321.000



2				Pilihan								
2	25			Kelautan dan Perikanan								
2	25	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan								
2	25	20	13	Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan	SKPD	Jumlah jenis pakan yang disediakan	5 Jenis	0	-	Pakan induk, pakan benih 1, pakan benih 2, pakan benih 3, artemia	5 Jenis	400.000.000
2	25	20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	SKPD	Jumlah produksi benih ikan unggul yang tersedia untuk masyarakat	346.600 Ekor	350.000.000	-		366.500 Ekor	532.400.000
2	25	20	02	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Kabupaten	Jumlah peserta sosialisasi pembudidaya ikan yang memahami Cara Budidaya Ikan Yang Baik	60 Orang	95.000.000	-	Sosialisasi dan temu usaha	60 Orang	90.300.000
2	25	20	05	Revitalisasi Perikanan Budidaya Di Kawasan Budidaya Air Tawar	Kabupaten	Jumlah kelompok perikanan budidaya penerima sarana dan prasarana sesuai kriteria	5 Kelompok	600.000.000	-		5 Kelompok	296.600.000
2	25	21		Program Pengembangan								

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



				Perikanan Tangkap								
2	25	21	01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kabupaten	Jumlah nelayan tangkap yang dibina dan berkembang usahanya	180 Orang	195.263.000	-		180 Orang	215.000.000
2	25	21	07	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kabupaten	Jumlah kelompok perikanan penangkapan penerima sarana dan prasarana sesuai kriteria	3 Kelompok	590.000.500	-	Pengadaan sarpras penangkapan	3 Kelompok	146.000.000
						TOTAL		3.893.668.800				0

BAB V

P E N U T U P

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN tahun 2020 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Di dalam penyusunan Renja DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN tahun 2020 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.
- c. Rencana Kerja DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Tahun 2020 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Selatan maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Barito Kuala dan Renstra SKPD).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur peternakan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan

seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

- b. Menerapkan system *reward* and *punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

